



Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadugenep Kabupaten Serang

Alvin Muntako Jaelani¹, Figo Sakifli Rahmatulloh², Indri Febriyanti³, Putri Cecilia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Received: 24 November 2022

Revised: 26 November 2022

Accepted: 28 November 2022

Abstrak

Poverty is a social problem that gets special attention in the world. The problem of poverty in developing countries is a fairly complex problem because it often still occurs. In Indonesia itself, the problem of poverty is a social problem that is always worthy and interesting to be studied further. One of the benchmarks for the progress of a country is the number of poor people in the country. To overcome the problem of poverty and empower the poor in Indonesia, the government has developed and implemented various programs. Specifically for social security issues, especially poverty problems, the government created the Family Hope Program (PKH). The Family Hope Program (PKH) in Kadugenep Village has not run well in accordance with the objectives launched by PKH, namely to improve and advance the standard of living for beneficiary families. The implementation of the PKH program in Kadugenep Village still needs to be addressed.

Keywords: Program, Poverty, Standart of living

(*) Corresponding Author: Alvinencep@gmail.com

How to Cite: Jaelani, A., Rahmatulloh, F., Febriyanti, I., & Cecilia, P. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadugenep Kabupaten Serang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 26-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460394>.

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah sebuah permasalahan sosial yang menjadi perhatian khusus di dunia saat ini. Persoalan kemiskinan pada negara berkembang cukup kompleks kdiarenakan sering terjadi. Di Indonesia sendiri, kemiskinan ialah sebuah permasalahan sosial yang selalu layak dikaji lebih lanjut. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah sedang merencanakan langkah-langkah preventif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun, penanggulangan ini seringkali tidak mengarah pada solusi yang diharapkan.

Fakta bahwa masalah kemiskinan belum terselesaikan mendesak perlunya strategi baru untuk mengurangi kemiskinan dengan mengatasi akar masalah kemiskinan. Pendekatan komprehensif harus dilakukan dalam strategi program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaannya harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu mengikutsertakan seluruh elemen, termasuk pemerintahan, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dana masyarakat miskin itu sendiri, untuk mencapai manfaat yang nyata dengan meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan.

Kemiskinan dapat diukur dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan



finansial, terutama kebutuhan pokok dan non-gizi, juga dari aspek pengeluaran. BPS mempergunakan konsep keterampilan dalam menunjang kebutuhan yang mendasar (*basic needs approach*) dalam menganalisa taraf kemiskinan. Jadi penduduk miskin ialah penduduk dengan rerata bulanan pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Edi Soeharto (2013:17) Penyebab seseorang dan keluarga miskin juga bisa banyak masalah terkait, seperti sumber daya alam dan infrastruktur. Faktor ini merupakan penting yang memerlukan perhatian oleh pemerintahan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin dalam membentuk SDM yang memiliki kualitas. Pada saat pandemi COVID-19, banyak sekali gambaran kemiskinan yang tercipta oleh dampak virus corona. COVID-19 telah menguji keadaan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan oleh dampaknya pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintahan dalam pencegahan menyebarnya COVID-19, mengakibatkan sejumlah orang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya.

Kemiskinan juga merupakan permasalahan sosial yang dapat menjadikan pembangunan nasional terhambat. Ukuran kemajuan suatu negara adalah jumlah penduduk miskin di negara tersebut. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin Indonesia, pemerintahan Indonesia sudah mengembangkan serta melaksanakan sejumlah program. Khusus untuk masalah jaminan sosial khususnya masalah kemiskinan, pemerintah menyusun Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial yang tertuang pada SK Kemensos RI No.1 Tahun 2018 “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) didasarkan pada UU No 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, UU No 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Sosial, UU No 13 Tahun 2011 tentang Perlakuan Keluarga Miskin dan UU No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial”.

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Dalam KBBI, kebijakan diartikan menjadi seperangkat konsep dan prinsip perencanaan untuk melaksanakan pekerjaan, memimpin, dan praktek. Istilah lainnya dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Yulianto Kadji (2015:9) Kebijakan Publik didefinisikan, yaitu. “Terlepas dari apa yang ditetapkan oleh pemerintahan untuk dilaksanakan maupun tidak”, Istilah ini menyatakan bahwasanya kebijakan publik ialah tentang manifestasi dari “tindakan” dan bukanlah sekedar ekspresi dari kehendak pemerintah atau pejabat. Politik adalah usaha dalam mengetahui apa yang pemerintah lakukan dan tidak lakukan, apa yang menyebabkan atau mempengaruhi mereka, dan efek dari kebijakan publik tersebut ketika dilaksanakannya maupun tidak. Carl Frederich dalam film Yulianto Kadji (2015: 9) menyatakan kebijakan ialah sebuah aktifitas yang mengarahkan terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh individu, kelompok, atau

pemerintahan pada sebuah lingkungan tertentu sehubungan pada hambatan tertentu dalam menemukan cara tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan.

Dari pendapat sejumlah ahli diperoleh kesimpulan bahwasanya kebijakan publik ialah sekumpulan tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik atau untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. Pedoman dalam melaksanakan sesuatu umumnya terdapat dalam tata cara yang mengikat atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintahan.

Konsep Evaluasi

Pada dasarnya kebijakan publik dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Evaluasi dilaksanakan dikarenakan tidak seluruh program kebijakan publik tercapai berdasarkan hasil yang diharapkan. Sering kali kebijakan publik mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan bertujuan guna mengkaji alasan mengenai gagalnya kebijakan atau menetapkan apakah kebijakan publik sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan Sudyana (2008:9). Rusydi dalam Ananda (2017:3) Menafsirkan evaluasi ialah sebuah aktifitas di mana informasi dikumpulkan, dikelola

Dan disajikan pada saat mengambil keputusan tentang program yang sedang atau sudah dilakukan. Peringkat produk ialah kompilasi skor misalnya berguna maupun tidak berguna, baik atau buruk, tercapai maupun tidak tercapai, ditingkatkan atau terbatas, dilanjutkan atau dihentikannya, dll. Terkait dengan program yang sedang berjalan atau berlangsung. Menurut Lester dan Stewart dalam Chazali H. Situmorang (2016: 282), evaluasi bisa dibagi menjadi dua tugas yang terpisah. Tugas utamanya ialah menetapkan dampak dari kebijakan melalui mendeskripsikan efeknya (apakah program kebijakan publik sudah mengalami keberhasilan berdasarkan tujuan yang diharapkan atau tidak). Tugas yang lainnya ialah mengevaluasi keberhasilan atau gagalnya dalam sebuah kebijakan terhadap kriteria atau kondisi yang diberikan.

Berdasarkan berbagai definisi yang dipaparkan oleh para ahli diatas, bisa diambil simpulan bahwasanya evaluasi adalah sebuah aktifitas yang bertujuan untuk mengetahui implementasi selanjutnya menilai perkembangan kebijakan, apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan benar atau belum, dan juga menjadi penentu apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Konsep Evaluasi Program

Program didefinisikan sebagai unit fungsional yang mewakili implementasi atau berlangsungnya pelaksanaan kebijakan pada proses yang berkelanjutan pada sebuah organisasi yang melibatkan seseorang (Arikunto dan Jabar, 2009: 4). Dalam program memiliki unsur-unsur terpenting di dalamnya,

diantaranta:

- 1) Program ialah pelaksanaan dari sebuah kebijakan.
- 2) Prosesnya memerlukan jangka waktu yang lama, serta bukan merupakan proses satu kali tetapi beberapa proses yang berkelanjutan.
- 3) Terjadi pada sebuah organisasi yang melibatkan seseorang.

Johanna dalam Rusydi Ananda (2017:5) mendefinisikan program ialah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan harapannya akan menghasilkan suatu hasil maupun akibat. Juga Suherman dan Sukjaya (1990:24) menyajikan program sebagai rencana aksi yang dikembangkan secara fungsional serta memperhatikan semua faktor yang terkait terhadap implemenasinya serta pencapaiannya sebuah program. Menurut penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, bisa diartikan bahwasanya program ialah suatu perencanaan yang meliputi sejumlah unit yang memuat pedoman serta serangkaian aktifitas yang perlu diselesaikan berdasarkan waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini program adalah serangkaian kegiatan yang terencana. Pada saat yang sama, Briekerhoff (1983:2) Rusydi dalam Ananda (2017:6) pengertian evaluasi program ialah sebuah proses dalam menetapkan berapa banyak tujuan program sudah dicapainya, memberi informasi dalam mengambil keputusan, melaksanakan kinerja berdasarkan standar dalam mengidentifikasi ketidakseimbangan, harga, serta memeriksa nilai secara sistematis atau kualitas barang.

Dari sejumlah pengertian di atas, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa evaluasi program ialah sebuah aktifitas untuk mendapatkan informasi mengenai berfungsinya program, berdasarkan alternatif mana yang ditentukan atau solusi yang tepat untuk masalah dipilih dalam proses pengambilan keputusan.

METHODS

Metode evaluasi yang evaluator gunakan yaitu metode survei untuk mengidentifikasi kegiatan program yang sedang berlangsung, mengumpulkan dan menggambarkan informasi faktual, serta menerangkan aspek-aspek yang perlu dievaluasi dari Program Keluarga Harapan di Desa Kadugenep, Kabupaten Serang. Laporan evaluasi ini akan menggunakan pendekatan evaluasi dengan menggunakan analisis kualitatif. Menggunakan kualitatif ini dengan harapan dapat menyelesaikan proses dengan memfokuskan pada suatu peristiwa berdasarkan fakta dan data yang sedang berlangsung, yang kemudian disusun dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Oleh karena itu, menggunakan metode tersebut untuk menggali perspektif masyarakat yang memiliki kewenangan, data dan pengetahuan serta hubungannya dengan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadugenep, Kab. Serang.

Untuk menganalisa mengenai tujuan yang terdapat dalam sebuah kebijakan program bisa tercapai atau tidak, maka dari itu kami memilih Model Evaluasi Dengan Basis Tujuan. Befokus terhadap perolehan informasi yang dirancang guna mengukur tercapainya sebuah tujuan kebijakan. Diantara nilai

pedoman yang dipergunakan sebagai indikator ialah efektivitas, responvitas, dan ketepatan. Data dan bukti diperoleh evaluator dari wawancara dan observasi. Sumber data yang dipergunakan evaluator ialah data primer dan sekunder (Sugiyono, 2017). Sumber data primer, diperoleh dari informan melalui interview mengenai evaluasi mengenai PKH oleh Kantor Kepala Desa Kadugenep. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui sumber lain. Data ini meliputi dokumen, laporan, artikel dan buku yang terkait pada Program Keluarga Harapan (PKH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Program

Pelaksanaan PKH menunjang upaya tercapainya Millennium Development Goals. Lima bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium yang didukung oleh PKH: Mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, bayi serta ibu. PKH adalah program pemberian uang tunai kepada KSM dengan syarat yang telah ditentukan dengan memenuhi kewajibannya.

Dalam tujuannya mengenai pelaksanaannya Program PKH terdapat tujuan jangka panjang dan pendek, tujuan jangka panjangnya yakni pemutusan rantai kemiskinan, menurunkan persoalan ketimpangan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan meningkatkan kesejahteraan bersama. Sementara tujuan jangka pendeknya yakni meningkatkan akses KPM PKH terhadap pendidikan serta pelayanan sosial, menurunkan tanggungan pengeluaran serta menjadikan pendapatan masyarakat miskin meningkat, serta merubah model perilakunya agar lebih maju. Pelaksanaan Program PKH memiliki banyak keunggulan dibanding pada program sosial pemerintahan lainnya yakni terdapat aktifitas yang memungkinkan kemandirian masyarakat miskin. Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat ialah sebuah proses meningkatkan keterampilan, kompetensi serta kemampuan masyarakat yakni mewujudkan perlindungan sosial dengan peningkatan kesejahteraan.

Waktu Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program meliputi menerima bantuan ini dilakukan dalam 3 bulan dan setiap bulan ada pertemuan dan rapat bulanan dalam meninjau ulang pendamping serta peserta PKH.

Profil Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadugenep Kabupaten Serang

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program bantuan sosial bagi keluarga miskin (KM) yang ditentukan dalam SK Kemensos sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kualitas kesehatan

anak balita, ibu hamil, lansia, serta pendidikan yang berkualitas ialah sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Desa Kadugenep Kabupaten Serang ialah sebuah desa penerima bantuan PKH. Berjalannya program PKH di Desa Kadugenep sudah ada kurang lebih 10 tahun. Di Desa Kadugenep, terdapat 1 pendamping PKH untuk menjelaskan pada peserta tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Mekanisme Bantuan Program Keluarga Harapan

Dalam penyalurannya dana PKH dilaksanakan 3 bulan sekali melalui bank BRI. Di tahun 2021 terdapat 120 peserta atau kepala keluarga di Desa Kadugenep sebagai penerima PKH.

Tanggapan Warga Terhadap Program Keluarga Harapan

Adanya bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu permasalahan yang sering timbul. Juga masih adanya beberapa keluarga yang seharusnya menjadi penerima program PKH tetapi tidak, yang disebabkan oleh tidak terdaftarnya nama keluarga di Disdukcapil, hal ini menjadikan banyak kritik yang diberikan oleh warga mengenai program PKH. Tidak dapat dipungkiri juga program PKH ini sangat sulit untuk dipahami beberapa warga, masih banyak warga yang gagal paham akan program PKH ini.

Pada kegiatan observasi, kami evaluator menemukan beberapa temuan-temuan evaluasi dalam program PKH di Desa Kadugenep. Dengan melakukan wawancara dan observasi, data yang di dapat evaluator rasa cukup untuk mengetahui hal yang harus di evaluasi karena data bersumber langsung dari orang yang senantiasa berkegiatan di desa dan saling keterkaitan dengan warga serta tentunya program PKH.

Data-data yang di dapat menggambarkan bahwa program PKH ini masih belum baik dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan itu tidak teratasi dengan baik. Perlunya peningkatan kinerja untuk Kementerian Sosial dan Dinas Sosial mengenai lambatnya pembaharuan data serta masih adanya warga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Malahan ironinya masih banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, itu menjadi salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh lambatnya pembaharuan data. Selain hal itu, masih kurangnya koordinasi secara langsung kepada warga dalam pelaksanaan program PKH menjadi salah satu faktor tidak tepatnya bantuan PKH karena pendamping hanya mengandalkan data yang tidak cepat diperbaharui oleh Kemensos dan tidak koordinasi dengan aparat desa yang pasti tahu kondisi objektif di desa tersebut.

Selain hal diatas masih adanya ada beberapa keluarga yang seharusnya menjadi penerima program PKH tetapi tidak, ini disebabkan oleh tidak terdaftarnya nama keluarga di Disdukcapil hal ini menjadikan adanya kritik yang

diberikan oleh warga mengenai program PKH. Tidak dapat di pungkiri juga program PKH ini sangat sulit untuk dipahami beberapa warga, masih banyak warga yang gagal paham akan program PKH ini, yang di sebabkan oleh banyak masyarakat miskin yang kurang mendapatkan pendidikan sehingga mereka gaptek akan teknologi yang ada. Dan ini menyebabkan terhambatnya kegiatan pendamping untuk mensosialisasikan dan pelaksanaan program PKH menjadi lambat dan terkadang banyak permasalahan yang timbul dari gapteknya warga disana.

PEMBAHASAN

Dalam menentukan taraf keberhasilan dalam sebuah program, diperlukan sebuah evaluasi. Mengevaluasi, dapat dikatakan mempertanyakan pengaruh sebenarnya dari proses akhir sebuah kebijakan, atau sejauh mana kebijakan itu tercapai berdasarkan hasil yang diinginkan sehubungan dengan tujuan yang direncanakan. Tercapainya sebuah program bisa diukur dengan adanya evaluasi, serta perlu dirumuskan sejumlah indikator atau standar sebagai acuan untuk dilakukan evaluasi.

Evaluasi ialah hal terpenting agar diterapkan dalam sebuah program. Dalam mengetahui taraf keberhasilan dari penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH), maka evaluasi program PKH di Desa Kadugenep, evaluator sendiri mempergunakan kriteria evaluasi menurut William Dunn:

1. Efektivitas

Efektivitas program ini erat kaitannya mengenai tercapainya pelaksanaan program Keluarga Harapan. Efektifitas Program PKH ini bisa dikethau melalui penyesuaian konsep berdasarkan fakta di lapangan sehingga tujuan pelaksanaan program ini bisa terlaksana secara baik. Dalam memahami keefektifan PKH ini, evaluator berusaha meninjau ke lapangan di Desa Kadugenep, dan evaluator melaksanakan sebuah pengamatan dengan mewawancarai pada pihak terkait. Untuk mengetahui efektivitas sebuah program, teradapat sejumlah hal yang dapat dijadikan dasar untuk memahami apakah program tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

a. Komitmen

Komitmen ialah sebuah syarat dalam penyelenggaraan PKH, dan efektivitas PKH yang dilaksanakan bisa diketahui melalui komitmen mereka agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Apabila masyarakat mematuhi serta tidak melanggar kebijakn yang telah disepakatinya, maka program tersebut bisa dilaksanakan. Berdasarkan pedoman umum PKH, adanya sejumlah hal terkait kewajiban yang perlu dicermati secara baik oleh peserta PKH/KPM dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pedoman umum

tersebut antara lain:

- 1) Bagi ibu hamil agar memeriksakan kandungannya.
- 2) Memeriksa kembali pasca bersalin.
- 3) Mengantarkan anak berusia 0-5 tahun ke posyandu.
- 4) Bagi lansia agar memeriksakan kesehatannya.
- 5) Anak usia agar rajin bersekolah.

Apabila peserta tidak masuk dalam persyaratan komitmen yang sudah disepakatinya maka berlaku ketentuan:

- 1) Teguran.
- 2) Mengurangi /memotong dana PKH yang diterimanya.
- 3) Tidak lagi menjadi peserta KPM (PKH).

KPM di Desa Kadugenep belum sepenuhnya menjalankan komitmen dengan baik dan memperhatikan kesehatan anggota keluarga serta kebutuhan sekolah anak. Pemerintah sudah memberi bantuan seharusnya sebagai penerima harus menjalankan peraturan pemerintah dengan baik. Melalui sebuah komitmen dan sanksi, diharapkan penerima PKH agar selalu memelihara serta melaksanakan kewajibannya yang sudah ditentukan pemerintahan guna tercapainya tujuan yang diinginkan.

2. Responsivitas

Responsivitas dari PKH ini ialah sebuah bentuk daya tanggap yang dihasilkan oleh kepuasan peserta PKH terhadap pelaksanaan bantuan PKH. Daya tanggap biasanya datang dalam bentuk tanggapan positif atau negatif. Responsivitas berkaitan pada berapa jauh sebuah kebijakan memenuhi kebutuhan. Pelaksanaan dari PKH di Desa Kadugenep mendapat respon positif dari pelaksana dan masyarakat peserta PKH.

Penerima bantuan atau KPM di Desa Kadugenep merasa puas dengan bantuan ini dan secara finansial terbantuan serta sangat berterima kasih, dikarenakan bantuan ini dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga, serta diharapkan bantuan ini dapat terus berlanjut, dan mereka juga berharap menjadi KPM, dan tetap aktif menjadi peserta PKH.

3. Ketepatan

Ketepatan PKH berdasarkan terhadap apakah tujuan atau nilai-nilai program bisa menyesuaikan dengan situasi sebenarnya terhadap PKH di lapangan. Keakuratan peserta bisa dibilang hampir tepat, serta sudah terlaksana secara baik berdasarkan yang diharapkannya. Tetapi karena masih suka adanya data yang telat di perbaharui membuat sering terjadi kekeliruan dalam pemberian bantuan.

Berjalannya program PKH di Desa Kadugenep, Kabupaten Serang ini sudah berjalan 10 tahun yang lalu. Untuk pengelola program PKH ini bukan hanya dari aparat desa saja namun ada dari Kementerian Sosial yang fungsinya

yaitu melakukan pendampingan terhadap program PKH di desa Kadugenep. Satu orang yang diutus dari Dinas Sosial memegang 3 desa untuk pengelolaan program PKH ini.

Faktanya bantuan dari pemerintahan di Desa Kadugenep dirasa belum cukup, terdapat sejumlah warga miskin yang tidak memperoleh bantuan dari program PKH dan juga masih banyak target program PKH ini tidak tepat sasaran di desa Kadugenep ini. Untuk syarat menjadi penerima PKH diantaranya ibu hamil, mempunyai balita, punya anak sekolah, punya anggota keluarga yang sudah lansia, dan cacad. Kuota untuk penerima PKH di desa kadugenep yaitu 120 keluarga.

Tak sedikit kontra ataupun aduan dari warga Kadugenep untuk PKH seperti ada warga yang merasa harus menerima bantuan tetapi dia tidak mendapatkan bantuan itu. Peran desa hanya menguruskan pendistribusian saja, untuk bisa menerima bantuan atau tidak dan nominalnya itu tugasnya pendamping yang diutus Dinas Sosial. Selain itu bentuk aduan negatif seperti cacian makian kepada aparat desa.

Permasalahan lain yang pernah terjadi di desa Kadugenep terjadi disaat pandemi kemarin yaitu orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih muncul di data penerima bantuan. Ternyata itu dikarenakan data yang digunakan saat pandemi adalah data yang lama dan data belum diperbarui sampai sekarang. Oleh sebab itu masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena bantuan langsung tunai tidak boleh dialokasikan kepada orang yang tidak terdata. Masyarakat miskin di desa kadugenep banyak dan belum tercukupi dengan adanya bantuan program PKH.

Penerima program PKH mendapatkan bantuan pangan dan tunai. Bantuan tersebut cair dalam jangka 3 bulan sekali. Semua sudah dikemas dalam bentuk kartu jadi KPM PKH tinggal menggunakannya ke atm yang disediakan. Tetapi karena masih bersifat tradisional warga desa Kadugenep sering melakukan kesalahan dalam transaksi di atm, ada yang kartunya tertelan ada yang belum mengerti pengoperasiannya. Padahal pendamping sudah memberitahu cara pengoperasiannya tetapi masih saja kasus seperti tersebut ditemukan. Pendamping sendiri mengadakan *controlling* maksimal 3 bulan sekali. Komunikasi dari Dinsos kepada aparat desa lancar karena aparat desa Kadugenep sering berkoordinasi dengan Dinsos.

Calon penerima harus lebih sadar akan hak yang seharusnya lebih layak untuk diterima dan untuk pendamping sebaiknya melakukan koordinasi ke aparat desa terlebih dahulu untuk meminimalisir tidak tepat sarannya program PKH. Sedangkan untuk Dinas sosial atau pemerintah agar tidak lambat untuk memperbaharui data. Setiap pengambilan bantuan pendamping selalu memberikan

sosialisasi kepada warga tetapi ironinya masih banyak warga yang gaptek untuk hal tersebut yang membuat warga masih ketergantungan terhadap pendamping. Perlunya inisiatif lebih dari pemerintah seperti pembuatan satu tempat pengambilan bantuan di satu desa diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan program PKH ini.

Hasil observasi ini menyatakan bahwasanya Program PKH di Desa Kadugenep belum cukup bagus karena belum mencapai target PKH bertujuan meningkatkan serta menjadikan tingkat kehidupan keluarga penerima manfaat meningkat yakni dengan memberi akses pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan mengurangi pengeluaran karena masih adanya kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga mental masyarakat yang tidak ingin berusaha untuk berkembang.

KESIMPULAN

Sesuai hasil observasi dan analisis evaluator pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadugenep, bisa di ambil sebuah kesimpulan bahwasanya proses pelaksanaan PKH tidak berjalan secara baik berdasarkan tujuan yang digagas oleh PKH yakni memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan terhadap keluarga penerima manfaat.

Penyelenggaraan program PKH di Desa Kadugenep masih perlu dibenahi karena masih adanya salah sasaran KPM dan juga masih adanya warga yang bukan dari golongan tidak mampu memperoleh bantuan. Itu semua terjadi karena belum ada pembaharuan data KPM sehingga penerima bantuan tidak tepat sasarnya.

1. Efektifitas PKH di Desa Kadugenep belum terlaksana secara baik. Dari sisi komitmen KPM, tidak semuanya terlaksana secara baik. Hal ini menyebabkan banyaknya data yang tidak valid di pusat dikarenakan tidak melakukan pemutakhiran data, sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran.
2. Responsivitas PKH di Desa Kadugenep dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat merasakan senang serta terbantuan melalui program ini.
3. Ketepatan PKH ini di Desa Kadugenep ini bisa dibilang sudah hampir tepat karena dalam menentukan peserta melalui tahap yang sudah ditetapkan serta bermanfaat bagi peserta penerima bantuan.

RECOMMENDATION

Sesuai hasil observasi dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, terdapat sebuah saran diantaranya:

1. Agar bisa befokus terhadap proses penyadaran terhadap KSM sehingga

tidak lagi tergantung pada bantuan lain dan bisa mempergunakan bantuan secara benar.

2. Lebih memperbanyak kuantitas pendamping di tiap desa dan turun langsung untuk melakukan sosialisasi terkait program PKH agar paham pengoperasian pengambilan bantuan.
3. Koordinasi antar pemerintah dan desa perlu dikembangkan kembali, hal ini bertujuan agar Program PKH ini bisa mengembangkan mutu layanannya serta terlaksana secara efektif.

REFERENCES

- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45-56.
- Roidah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 12(14), 39-47.
- Suharto, E., & Thamrin, D. (2012). Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong mata rantai kemiskinan anak bangsa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 3(1), 1-20.
- Susanto, H. (2017). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Utomo, D. (2014). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).